

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.I. Kesimpulan**

Dari hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tiap-tiap indikator yang digunakan dalam penelitian, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini :

Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam kebijakan adalah petani mendapatkan perlindungan dari pemerintah akan harga komoditas pangan yang menguntungkan, pengutamaan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan kompensasi bila terjadi gagal panen. Pada kenyataannya Pemerintah belum mampu memberikan perlindungan kepada petani akan harga komoditas yang menguntungkan, belum mampu memberikan kompensasi gagal panen.

Petani mendapatkan manfaat seperti insentif dari pemerintah berupa keringanan pajak, fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, pemberian sertifikasi lahan pertanian secara sporadik. Insentif dari Pemerintah berupa keringanan pajak belum mampu dimanfaatkan dengan maksimal karena susahny persyaratan yang mesti dipenuhi. Namun untuk pemberian fasilitas serta sarana dan prasarana pertanian telah mencukupi kebutuhan pertanian dan sangat membantu para petani. Sedangkan penerbitan sertifikat yang telah berlangsung masih bersifat umum, belum khusus untuk daerah pertanian.

Kekuasaan petugas pelaksana seperti DPPP masih sebatas pemberi saran untuk lahan yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, sedangkan yang bisa menetapkannya adalah Kepala Daerah. DPTR lebih banyak melakukan pengawasa pada tanah yang melakukan izin penggunaan tanah untuk memberikan sanksi bagi pelanggar RTRW. Strategi yang digunakan oleh petugas pelaksana adalah memberikan bantuan sertifikasi lahan, pemasangan plang untuk lahan hijau, pengetatan dalam perizinan, keringanan pajak untuk lahan pertanian dan *agricultural land banking*. Strategi yang digunakan belum optimal, karena pelanggaran pada daerah kawasan hijau, pelanggaran perizinan, keringanan pajak tidak optimal dimanfaatkan petani.

Tingkat kepatuhan dan resposivitas petani pemilik lahan adalah dalam memilih untuk mempertahankan atau mengkonversi lahan pertanian, petani memilih pertimbangan ekonomis atau kebutuhan keluarga dibandingkan dengan melihat kebijakan yang ada. Sedangkan respon petani terhadap kebijakan perlindungan lahan adalah bersifat kondisional apabila lahannya masih bisa dipertahankan maka akan dipertahankan, namun berat untuk menerima kebijakan bila tidak diperbolehkan mengkonversi lahan dalam kurun waktu yang panjang.

Konversi lahan pertanian di Kabupaten Sleman masih saja terjadi setiap tahunnya, penurunan luas lahan pertanian berbanding terbalik dengan luas lahan

pemukiman. Dimana luas lahan pemukiman semakin meningkat, sedangkan luas lahan pertanian semakin mengurang. Hal ini menunjukkan bahwa, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman belum berlaku secara optimal.

## **VI.2. Saran**

1. Pemerintah semestinya tidak hanya memberikan penyuluhan tentang peningkatan produktifitas hasil pertanian, tetapi juga memberikan perlindungan kepada petani untuk masalah harga komoditas yang menguntungkan.
2. Mempermudah persyaratan bagi petani yang ingin mengajukan keringanan pajak, karena selama ini para petani merasa kesulitan bila ingin mengajukan permohonan keringanan pajak dan bangunan.
3. Strategi yang digunakan oleh petugas pelaksana mesti didiskusikan dengan masyarakat terlebih dahulu, karena sebagian besar strategi yang digunakan tidak dapat berjalan secara efektif.
4. Sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari Kepala Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena kebijakan perlindungan lahan melibatkan banyak aspek dan banyak sector.